

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN DESA (PADA BEBERAPA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

**Ai Nurkhalifah<sup>1</sup>, Lisna Lisnawati<sup>2</sup>, Erfan Erfiansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Muhammadiyah Bandung

[nurkhalipahai@gmail.com](mailto:nurkhalipahai@gmail.com), [lisna.lisnawati@umbandung.ac.id](mailto:lisna.lisnawati@umbandung.ac.id), [erfan@umbandung.ac.id](mailto:erfan@umbandung.ac.id)

**ABSTRAK**

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan merupakan syarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akuntabilitas, dan transparansi terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang merupakan perangkat desa di Kabupaten Bandung Barat secara purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi SAP yang tepat, peningkatan akuntabilitas, dan transparansi (keterbukaan informasi publik) berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan SAP, peningkatan akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaporan keuangan desa.

**Kata kunci:** Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas, Transparansi, laporan keuangan desa

**ABSTRACT**

*Accountable and transparent village financial management is the main requirement in realizing good village governance. This research aims to analyze the effect of implementing Government Accounting Standards (SAP), accountability and transparency on the accountability of village financial reports. The research method used was descriptive quantitative with survey techniques by distributing questionnaires to 30 respondents who were village officials in West Bandung Regency using purposive sampling. The analysis technique used is multiple linear regression. The research results show that the implementation of SAP, accountability and transparency have a significant effect, both partially and simultaneously, on the accountability of village financial reports. These findings indicate that proper SAP implementation, increased accountability, and transparency (openness of public information) play an important role in improving the quality of village financial reporting that is more*

**Article history**

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author Publish  
by : musytari



This work is licensed under  
a [creative commons  
attribution-noncommercial  
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*transparent, accurate, and accountable. This research emphasizes the importance of implementing SAP, increasing accountability and transparency in village financial reporting.*

**Keywords:** *Government Accounting Standards, Accountability Transparency, village financial reports .*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa memegang peranan krusial dalam mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan daerah. Sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia, desa berperan penting dalam pembangunan berbasis komunitas, sehingga penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa (Arifin Muksin, Treesje Runtu. 2023). Fenomena pelaporan keuangan desa menjadi menarik untuk dikaji karena pada kenyataannya masih ditemukan data dalam penyajian laporan keuangan pemerintah desa yang tidak selaras dengan realisasi anggaran (Sunarti et al. 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan desa belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual, sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang memengaruhinya secara empiris.

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan desa yang baik menjadi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah desa, serta membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, digunakan dan dipertanggungjawabkan secara transparansi. Transparan juga mengharuskan pemerintah menyampaikan informasi disampaikan kepada publik agar

masyarakat memperoleh informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran desa yang berasal dari pajak dan dana transfer. (Thoyib et al. 2020). Namun dalam banyak kasus, informasi keuangan tidak dipublikasikan secara terbuka, atau hanya disampaikan secara formal tanpa penjelasan yang memadai. Minimnya papan informasi, tidak adanya pelaporan rutin melalui media desa, serta rendahnya partisipasi warga dalam musyawarah desa.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi komponen penting yang menentukan kualitas laporan keuangan desa. Akuntabilitas mencakup penyampaian 2 informasi keuangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan agar mereka dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, akuntabilitas juga menjadi salah satu Langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Thoyib et al. 2020).

Di era globalisasi saat ini, tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin tinggi diberbagai sektor, termasuk pemerintahan. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu entitas, tetapi juga untuk pertanggungjawaban kepada semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah adalah entitas yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas semua program kegiatannya (RI. 2013).

Faktor penting lainnya adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di lingkungan pemerintahan desa. Pemerintahan Indonesia menerapkan SAP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, termasuk di tingkat desa, dengan tujuan menyusun laporan yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Di tingkat desa, SAP diimplementasikan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa), yang merupakan adaptasi dari SAP agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, laporan keuangan desa tetap mengacu pada prinsip-prinsip SAP yang berlaku secara nasional, namun disusun sesuai kondisi dan kebutuhan desa. Menurut (Prasetyo 2020), standar ini diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun, penerapan SAP di desa masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi yang belum optimal. (Sari and Nugroho. 2021) menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di desa terpencil dengan akses pendidikan terbatas, menjadi kendala utama dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi yang kompleks. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum memadai semakin memperburuk kualitas pelaporan keuangan desa (Putri and Yulianto. 2022).

Untuk mendukung implementasi SAP di desa, pemerintah menginisiasi pengembangan dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES adalah sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan

(BPKP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam proses pencatatan, pelaporan, hingga penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan penggunaan SISKEUDES, kualitas laporan keuangan desa diharapkan meningkat, serta dapat meminimalisir potensi kesalahan dan penyalahgunaan dana desa (Afriyeni et al. 2024).

Penerapan SAP mengikuti dua jenis basis akuntansi utama, yaitu basis kas (cash basis) yang mencatat transaksi saat uang diterima atau dibayarkan, dan basis akrual (accrual basis) yang mencatat transaksi saat terjadi, terlepas dari aliran kas. Terdapat beberapa modifikasi dari kedua basis tersebut, yang umumnya dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu basis kas (cash basis) yang mencatat transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan, dan basis kas modifikasian (modified cash basis) yaitu kombinasi antara pencatatan kas dan beberapa elemen akrual, basis akrual (accrual basis) yang mencatat transaksi pada saat terjadinya tanpa memperlihatkan aliran kas, dan terakhir basis akrual modifikasian (modified accrual basis) yang menggabungkan elemen dari basis 4 akrual dan kas untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan pemerintah. Pembagian ini pun tidak bersifat mutlak. Seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah Tahun 2019 mengenai SAP untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Salah satu perubahan mendasar adalah diwajibkan menerapkan akuntansi berbasis akrual termasuk pemerintah daerah, sebagai pengganti penggunaan akuntansi berbasis kas menuju akrual yang berlaku sebelumnya (Oktavia. 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan SAP, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa di beberapa desa di Bandung Barat.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui distribusi kuesioner kepada perangkat desa yang menjadi responden. Melalui pendekatan kuantitatif dan analisis statistik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang berguna bagi upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar lebih akuntabel dan transparansi.

Di Kabupaten Bandung Barat, pengelolaan keuangan desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, sebagian laporan keuangan desa belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata dan masih kurang memadai dari sisi pertanggungjawaban. Beberapa desa menghadapi kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntabilitas yang belum optimal, serta keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam (Barat 2023), Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat April 2023 mengindikasikan bahwa dari 165 desa yang ada, hanya 25 desa (15%) yang berhasil menyusun dan menyampaikan APBDes 2023 secara tepat waktu. Sisanya terlambat, yang berpotensi menunda pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dan menghambat pelaksanaan program pembangunan desa. Beberapa perangkat desa masih terbatas dalam memahami dan menerapkan SAP, disertai pengawasan yang belum memadai untuk menjamin akuntabilitas. Selain itu, transparansi keuangan desa masih terkendala oleh akses informasi yang terbatas dan komunikasi yang kurang optimal kepada masyarakat. 5 Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pada Beberapa Desa di Kabupaten Bandung Barat”.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif digunakan karena data penelitian berupa angka yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode survei untuk memperoleh data secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Variabel yang diteliti meliputi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban laporan keuangan desa.

Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan desa yang berkaitan dengan penerapan SAP, akuntabilitas, dan transparansi. Penelitian dilaksanakan pada beberapa desa yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data dalam penelitian, Kabupaten Bandung Barat memiliki 165 desa yang tersebar di 16 kecamatan, sedangkan penelitian ini mengambil beberapa desa sebagai sampel penelitian. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat menjadi objek yang relevan untuk menganalisis penerapan SAP, akuntabilitas, transparansi, serta pertanggungjawaban laporan keuangan desa.

Subjek penelitian adalah perangkat desa yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Populasi penelitian mencakup desa yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat,

dengan jumlah populasi sebanyak 165 desa. Dari populasi tersebut, penelitian menetapkan 30 desa sebagai sampel, dengan masing-masing desa diwakili oleh satu responden sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 30 orang. Responden merupakan perangkat desa yang memahami atau terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, seperti sekretaris desa, kepala desa, bendahara/kaur keuangan, kasi pemerintahan, maupun perangkat lain sesuai struktur administrasi masing-masing desa.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu agar responden yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria desa yang menjadi sampel meliputi desa yang berada di wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat, telah menyusun dan memiliki laporan keuangan desa secara rutin, memiliki perangkat desa yang memahami proses akuntansi dan pelaporan keuangan desa, serta dapat dijangkau dan bersedia berpartisipasi dalam pengisian kuesioner. Berdasarkan kriteria tersebut, dipilih 30 desa dengan satu responden dari setiap desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat desa. Kuesioner diberikan kepada responden dari masing-masing 30 desa yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian. Data yang diperoleh berupa jawaban responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan penerapan SAP, akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban laporan keuangan desa.

Responden yang mengisi kuesioner merupakan perangkat desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, termasuk sekretaris desa dan kepala urusan sebagai unsur staf yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Data primer tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses pengolahan dan analisis statistik untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang berasal dari perangkat desa di 30 desa yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Responden dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Dari 30 desa yang menjadi sampel penelitian, wilayah penelitian tersebar di Kecamatan Sindangkerta sebanyak 11 desa, Kecamatan Cililin sebanyak 11 desa, Kecamatan Batujajar sebanyak 7 desa, dan Kecamatan Cihampelas sebanyak 1 desa. Data yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan analisis statistik untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa.

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden, diketahui bahwa dari 30 responden terdapat 24 orang atau sebesar 80% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 6 orang atau sebesar 20% berjenis kelamin perempuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh aparatur desa berjenis

kelamin laki-laki. Meskipun demikian, keterlibatan responden perempuan juga menunjukkan adanya partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa, khususnya dalam kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan jabatan responden, sebagian besar responden merupakan Sekretaris Desa, yaitu sebanyak 16 orang atau 53,33%. Selanjutnya, terdapat 8 orang atau 26,67% yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, 4 orang atau 13,33% sebagai Kaur Keuangan, serta masing-masing 1 orang atau 3,33% sebagai Kaur Perencanaan dan Kaur Umum. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki keterkaitan dengan kegiatan administrasi pemerintahan maupun pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, informasi yang diberikan responden relevan dengan variabel yang diteliti, terutama mengenai penerapan SAP, akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban laporan keuangan desa.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) memiliki nilai minimum sebesar 33, maksimum 50, mean sebesar 43,37, dan standar deviasi sebesar 4,295. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAP oleh perangkat desa berada pada kategori sangat baik berdasarkan pengelompokan yang digunakan dalam penelitian. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap penerapan SAP cenderung tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini menggambarkan adanya kecenderungan persepsi yang relatif seragam mengenai penerapan standar akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Variabel Akuntabilitas (X2) memperoleh nilai minimum sebesar 22, maksimum 40, mean sebesar 33,40, dan standar deviasi sebesar 5,110. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas perangkat desa dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya dinilai baik oleh responden. Sementara itu, nilai standar deviasi yang lebih besar menunjukkan adanya variasi penilaian responden terhadap akuntabilitas antar desa. Variasi tersebut dapat menggambarkan adanya perbedaan kondisi atau kapasitas dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada masing-masing desa yang menjadi objek penelitian.

Variabel Transparansi (X3) memiliki nilai minimum sebesar 30, maksimum 45, mean sebesar 37,67, dan standar deviasi sebesar 4,444. Hasil tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berada pada kategori tinggi. Nilai rata-rata yang cukup mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Standar deviasi sebesar 4,444 juga menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relatif tidak terlalu tinggi, sehingga penilaian mengenai transparansi cenderung relatif homogen.

Sementara itu, variabel Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa (Y) memiliki nilai minimum sebesar 43, maksimum sebesar 55, mean sebesar 48,53, dan standar deviasi sebesar 4,117. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan desa berada pada kategori sangat baik. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa cenderung seragam.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa perangkat desa yang menjadi responden telah melaksanakan pertanggungjawaban laporan keuangan desa dengan penilaian yang relatif positif.

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Penerapan SAP, Akuntabilitas, Transparansi, dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa dinyatakan valid. Nilai  $r$  tabel yang digunakan sebesar 0,361, sedangkan seluruh nilai  $r$  hitung pada masing-masing item berada di atas nilai tersebut. Dengan demikian, seluruh pernyataan yang digunakan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian yang dimaksud. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Variabel Penerapan SAP memperoleh nilai 0,906, Akuntabilitas sebesar 0,922, Transparansi sebesar 0,917, dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa sebesar 0,861, sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05, sehingga residual penelitian dinyatakan berdistribusi normal. Selain itu, hasil Normal P-P Plot menunjukkan bahwa penyebaran data mengikuti garis diagonal. Pengujian asumsi klasik tersebut menjadi dasar bahwa data dapat digunakan untuk analisis regresi linear berganda dalam menguji hubungan antara Penerapan SAP, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Penerapan SAP memiliki koefisien regresi sebesar 0,284, Akuntabilitas sebesar 0,266, dan Transparansi sebesar 0,356. Ketiga koefisien tersebut bernilai positif, sehingga berdasarkan model penelitian terdapat hubungan positif antara ketiga variabel independen dengan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa. Hasil uji  $t$  menunjukkan bahwa Penerapan SAP memperoleh nilai  $t$  hitung 2,645 dengan signifikansi 0,014, Akuntabilitas memperoleh  $t$  hitung 2,173 dengan signifikansi 0,039, dan Transparansi memperoleh  $t$  hitung 2,902 dengan signifikansi 0,007. Ketiga nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel sebesar 2,055 dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dengan demikian, ketiga variabel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa.

Hasil uji  $F$  menunjukkan nilai  $F$  hitung sebesar 63,610 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan  $F$  tabel sebesar 2,98. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Penerapan SAP, Akuntabilitas, dan Transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa. Selanjutnya, hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted  $R$  Square sebesar 0,866. Artinya, sebesar 86,6% variasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa dapat dijelaskan oleh Penerapan SAP, Akuntabilitas, dan Transparansi dalam model penelitian, sedangkan sebesar 13,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan antara variabel

Penerapan SAP, Akuntabilitas, dan Transparansi dengan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa di wilayah penelitian Kabupaten Bandung Barat.

## 1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa

Pengujian pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 2,645 dengan nilai signifikansi  $0,014 < 0,05$ , yang artinya bahwa penerapan SAP secara parsial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan SAP secara parsial berpengaruh terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa diterima.

Hal ini terjadi karena pemerintah desa sudah berupaya menerapkan prinsip-prinsip SAP sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melalui prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, akuntansi aset, serta pencatatan transaksi keuangan yang sistematis. Penerapan SAP membantu perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosana dan Bharata (2023) yang menyatakan bahwa implementasi SAP berbasis akrual secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Marpaung et al. (2023) juga menyatakan bahwa meskipun belum diterapkan secara sempurna, penerapan SAP tetap menjadi dasar penting dalam pertanggungjawaban keuangan desa.

## 2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa

Pengujian pengaruh akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 2,173 dengan nilai signifikansi  $0,039 < 0,05$ , yang artinya bahwa akuntabilitas secara parsial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan 63 desa. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa diterima.

Hal ini terjadi karena pemerintah desa sudah melaksanakan fungsi akuntabilitas melalui penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. Proses pencatatan transaksi dilakukan oleh perangkat desa yang membantu dalam pelaporan secara tertib, dan laporan keuangan disusun berdasarkan bukti transaksi yang sah serta disampaikan secara tepat waktu. Hasil ini sejalan dengan penelitian Afriyeni et al. (2024) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian oleh Yohana Oktavia (2022) juga membuktikan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

## 3. Pengaruh Transparansi terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa

Pengujian pengaruh transparansi terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 2,902 dengan nilai signifikansi  $0,007 < 0,05$ , yang artinya bahwa transparansi secara parsial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban

laporan keuangan desa. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa diterima. Hal ini terjadi karena pemerintah desa sudah menerapkan transparansi melalui penyajian informasi keuangan yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi dilakukan melalui musyawarah desa, papan informasi anggaran, serta publikasi laporan secara terbuka.

Keterbukaan informasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan dana desa secara langsung, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga. Hasil ini sejalan dengan penelitian Afriyeni et al. (2024) yang menyatakan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, penelitian Marpaung et al. (2023) juga membuktikan bahwa desa yang terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan memiliki tingkat pertanggungjawaban yang lebih baik. .

#### **4. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa**

Pengujian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas, dan transparansi menunjukkan bahwa berpengaruh secara simultan terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa. Diperoleh nilai  $F_{hitung} = 63,610 > F_{tabel} = 2,98$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akuntabilitas, dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan desa.

Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan desa tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan kombinasi penerapan SAP, akuntabilitas, dan transparansi secara simultan. SAP menjadi dasar teknis dalam penyusunan laporan, akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas dari perangkat desa, sementara transparansi menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi, sehingga kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan desa meningkat.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Oktavia (2022) yang menyatakan bahwa penerapan SAP, akuntabilitas, dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian Afriyeni et al. (2024) juga memperkuat bukti bahwa integrasi prinsip akuntabilitas dan transparansi yang didukung penerapan akuntansi sektor publik mampu menghasilkan laporan keuangan desa yang lebih berkualitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP, akuntabilitas, dan transparansi secara bersama-sama berkontribusi signifikan dalam menciptakan sistem pelaporan keuangan desa yang tertib, transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. .

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat Pengaruh antara variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X1) terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi, maka

semakin tinggi kualitas  
pertanggungjawaban laporan  
keuangan desa.

2. Terdapat pengaruh antara variabel Akuntabilitas (X2) terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa (Y). Hal ini disebabkan karena perangkat desa menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Perangkat desa telah menyusun laporan berdasarkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Terdapat pengaruh antara variabel Transparansi (X3) terhadap pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa (Y). Hal ini karena pemerintah desa telah melakukan prinsip transparansi secara optimal, yang tercermin dari penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat.
4. Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Akuntabilitas (X2), dan Transparansi (X3) terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa (Y). Hal ini karena ketiga faktor tersebut saling melengkapi, di mana penerapan SAP memberikan dasar penyusunan laporan sesuai standar, akuntabilitas menegaskan pertanggungjawaban aparat desa, dan transparansi memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga kualitas laporan keuangan desa semakin baik.

## SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait guna meningkatkan mutu pertanggungjawaban laporan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat: Bagi pemerintah desa:

1. Pemerintah desa perlu lebih konsisten menerapkan prinsip-prinsip SAP sesuai PP No. 71 Tahun 2010, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas perangkat desa dengan pelatihan rutin serta bimbingan teknis mengenai standar akuntansi agar laporan keuangan desa tersusun sesuai aturan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pemerintah desa disarankan memperkuat sistem pertanggungjawaban dengan memperjelas prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Pengawasan internal maupun eksternal juga perlu ditingkatkan agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum.
3. Pemerintah desa sebaiknya tidak hanya mengandalkan papan pengumuman, tetapi juga menggunakan media digital seperti website desa, media sosial resmi, atau aplikasi komunikasi warga untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran. Dengan cara ini, masyarakat lebih mudah mengakses informasi secara cepat, jelas, dan tepat waktu.

4. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi pertanggungjawaban laporan keuangan desa, seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan penggunaan teknologi informasi. Selain itu, cakupan wilayah penelitian dapat diperluas agar hasil penelitian dapat lebih general dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan tata kelola keuangan desa yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, Puji, Anisa Fitriani, Arifah Mawaddah, and Oktavia Saputri. 2024. "Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Di Desa Meranti Bunting Puji." *Jurnal Ekonomi Akuntansi V(Persediaan):1-12*.
- Andriani, P., Suarsa, A., & Yuniati, Y. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada PDAM Tirtawening Kota Bandung. *Jurnal SEMAR: Sain Ekonomi Manajemen & Akuntansi Rivi*, 1(3), 26-41.
- Arifin Muksin, Treesje Runtu, Christian V. Datu. 2023. "Transparency And Accoutability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Arumamang Village West Kasiruta District South Halmahera Regency." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 6(2):1281-96.
- Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung. 2023. "DPMD KBB Ingatkan 140 Desa Agar Selesaikan APBDes 2023." <https://jabar.bpk.go.id/dpmd-kbb-ingatkan-140-desa-agar-selesaikan-apbdes2023/>.
- Bisnis, Jurnal Ekonomi, and Akuntansi Jebma. 2024. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ( S AP ) Pada Laporan Keuangan Desa Di Desa Tegide ' u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat." 1787-99.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi-9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2021. *Partial Least Squares (PLS): Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Edisi ke-3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, and Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*.
- Hidayat, Dina, Marta Sari, Firdaus AR, and Kania Azizah. 2021. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Valuta* 7(1):1-13.
- Kusmila, Zesmi, Cyntia Carolina, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, and Sakti Alam. 2024. "Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Pondok Siguang Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci." 17(2):1855-62.
- Lisnawati, L. (2018). Pengaruh Audit Internal Terhadap Pengelolaan Kredit Di Bank BJB Kelas 1 Bandung Raya. *STIE Sebelas April Sumedang*, 19.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ke-3. UPP STIM YKPN. 68
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marpaung, Dinda Andriani, Muhammad Arif, and Laylan Syafina. 2023. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa Padang Mahondang

- Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.” JKA: Jurnal Kendali Akuntansi 1(4):243- 64.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. “Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” Physical Review B 72(10):1-13.
- Mirawati, Yosi. 2020. “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.” Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa 1-24.
- Oktavia, Yohana. 2022. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.” 9:356-63.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2025. “Standar Akuntansi Pemerintahan.” Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prasetyo, A. 2020. “Akuntabilitas Keuangan Desa Dalam Kerangka Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik.” Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik 9(1), 45-59.
- Putri, M., and B. Yulianto. 2022. “Tantangan Pengelolaan Keuangan Desa Di Era Digital: Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik.” Jurnal Teknologi Informasi Dan Akuntansi 11(3), 77-90.
- RI, BPK. 2013. “Pengelolaan Keuangan Negara Harus Transparan Dan Akuntabel.” <https://www.bpk.go.id/news/pengelolaan-keuangan-negara-harus-transparandan-akuntabel>.
- Rosana, Lina, and Risma Wira Bharata. 2023. “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.” Jurnalaku 3(1):23-34. doi:10.54957/jurnalaku.v3i1.366.
- Saputra, Wendi Aji, and Eva Kurnia Farhan. 2021. “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.” Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi 9(2):21-31. doi:10.34010/agregasi.v9i2.5386.
- Sari, R., and T. Nugroho. 2021. “Kesiapan Desa Dalam Implementasi Standar Akuntansi Sektor Publik: Studi Kasus Di Wilayah Terpencil.” Jurnal Administrasi Publik 13(2), 35-50. 69
- Sari, Rizki Puspita. 2018. “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih.” Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) DAL.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Cet 29 tah.
- Sunarti, Nyoman, Ni Nyoman Yunita Lestari, Putu Purnama Yanti, Luh Gede Widya Asty, Uzlifah Uzlifah, and Ni Komang Leli Mayuni. 2019. “Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika 8(1):42-50. doi:10.23887/jinah.v8i1.19860.
- Taufik, Taufeni. 2020. “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 1-61.
- Thoyib, M., Chandra Satria, Septiana Septiana, and Darul Amri. 2020. “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin).” Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 5(2):13-30. doi:10.36908/esha.v5i2.122.
- Wardati, Salimah. 2020. “Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.” Universitas Muhammmadiyah Sumatera Utara.

Yanti, Nanda Saputri, Anwar Made, and Supami Wahyu Setiyowati. 2020. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 8(1):1-8. doi:10.21067/jrma.v8i1.4455.

Yodaswara, Saeful, Erlan Suwarlan, and Otong Husni Taufiq. 2022. “Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.” 2(2):3421-31.

Yuniati, Y., & Bagianto, A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Serta Implikasinya pada Manajemen Aset dan Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 5(1), 17-46